

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara jajahan dan korban kolonialisme Eropa di Asia Tenggara. Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1945 setelah berhasil mengusir penjajah dari Jepang maupun Belanda. Beberapa negara di dunia juga telah mengakui kedaulatan negara Indonesia dan berhak atas wilayahnya. Salah satunya adalah Palestina. Palestina menjadi salah satu negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Hal ini disebabkan adanya hubungan baik antar kedua negara yang demikian juga dengan persamaan identitas yang sama yaitu memiliki penduduk mayoritas muslim. Identitas ini menjadi salah satu alasan mengapa kedua negara ini memiliki hubungan luar negeri yang baik.

Namun, pada saat ini Palestina menjadi negara yang hingga kini masih belum meraih kemerdekaannya. Perang antara Israel dan Palestina yang telah dimulai sejak lama menjadikan Palestina tidak dapat berdiri merdeka di atas tanahnya sendiri. Puluhan tahun mengalami perang membuat Palestina menderita dan mengalami kerugian yang sangat besar. Namun, walaupun telah berperang dalam waktu yang sangat lama, mengapa Palestina hingga saat ini masih bertahan dengan kapasitas militer yang dapat terbilang tidak ada. Sedangkan Israel memiliki kekuatan militer dan teknologi yang sangat canggih. Hal ini disebabkan bantuan-bantuan yang datang dari luar negeri dan kesediaan untuk tetap mendukung kemerdekaan Palestina (Arosoaie, 2015).

Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif mendukung dan memberikan bantuan secara langsung

terhadap Palestina. Sejak dimulainya perang Israel-Palestina Indonesia turut aktif melakukan kampanye dan mendorong-mendorong negara lainnya untuk turut berpartisipasi aktif dalam mendukung Palestina. Salah satu contohnya adalah Indonesia. Indonesia menjadi tuan rumah *International Conference on the Question of Jerusalem* pada tanggal 14-16 Desember 2015 bekerjasama dengan Organisasi Kerjasama Islam dan *United Nations Committee on the Inalienable Rights of the Palestinian People*. Dalam forum ini, Indonesia membahas tentang isu Jerusalem. Indonesia menjadikan isu tersebut menjadi salah satu isu utama yang harus dibahas. Selain itu Indonesia mengajak negara-negara yang hadir untuk memberikan dukungan kepada Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan (Kementrian Luar Negeri Indonesia, 2019).

Contoh diatas merupakan salah satu diantara sekian banyak usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Keputusan yang dikeluarkan oleh Indonesia untuk membantu Palestina tentu melalui mekanisme perumusan kebijakan luar negeri yang dimana tentu terdapat kepentingan nasional di dalamnya. Selain itu kebijakan juga dibuat tidak hanya semata-mata hak prerogatif Presiden ataupun hanya sekedar usulan dari dewan legislatif. Kemudian setiap negara mempunyai alasan dalam mengambil sebuah keputusan dan kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, Indonesia juga mempunyai alasan dan motif untuk terus membantu Palestina.

Indonesia membantu dan turut berpartisipasi aktif dalam membantu Palestina mempunyai beberapa motif. Diantaranya yaitu sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang berbunyi untuk menghapuskan segala bentuk penjajahan dan ketidakmanusiaan. Kemudian, Presiden Republik Indonesia pertama, Ir. Soekarno juga telah memberikan amanah dan pesan untuk tidak meninggalkan Palestina. Pesan ini menjadi landasan pemerintah Indonesia dalam mengambil keputusan untuk

terus berpartisipasi aktif dalam mendukung Palestina. (Hoesterey, 2013)

Kemudian, alasan berikutnya yaitu berasal dari pernyataan tokoh pemuka agama yaitu Ketua Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH.Aqil Siradj. Dalam pernyataannya beliau mengatakan Nadhlatul Ulama (NU) telah lama hadir untuk tetap mendukung Palestina hingga merdeka. Keputusan tersebut tidak akan pernah berubah hingga Palestina meraih kemerdekaannya (Rijal Mumazziq Z, 2017). Pernyataan ini merupakan salah satu pernyataan dari sekian banyak tokoh agama yang juga mengutarakan pernyataan yang sama. Dengan kata lain, pernyataan-pernyataan tersebut menjadi landasan Pemerintah Indonesia sebagai badan eksekutif untuk terus berpartisipasi aktif dalam mendukung Palestina.

Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menjadi lebih aktif dalam menyikapi Isu Yerusalem sejak pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel (BBC , 2017). Bahkan Amerika Serikat juga telah memindahkan kedutaan besarnya secara resmi dari Telaviv ke Yerusalem pada tahun 2018 (Sekarwati, 2018). Pernyataan ini menimbulkan pro dan kontra dalam dunia hubungan internasional. Beberapa negara yang menjadi sekutu kuat Amerika Serikat mendukung usaha Trump sebab dia telah melaksanakan janji kampanyenya. Namun, tidak sedikit juga negara-negara yang mengecam tindakan sepihak oleh Presiden Amerika Serikat tersebut (Krieg, 2017).

Indonesia dalam menghadapi peristiwa tersebut kemudian mengupayakan cara untuk mendukung Palestina dan salah satu caranya adalah bergabung dalam keanggotaan DK PBB. Pada dasarnya sebelum peristiwa tersebut, Indonesia telah membuat rencana dan misi menjadi anggota tidak tetap DK PBB untuk tampil aktif di forum internasional. Namun, setelah peristiwa tersebut Indonesia kini semakin aktif untuk mencari dukungan di

berbagai forum internasional salah satunya di DK PBB. Salah satu tujuan Indonesia juga agar peluang dalam mengangkat isu Palestina dalam forum DK PBB semakin meningkat.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan diatas bahwa dalam penelitian ini akan dibahas mengenai latar belakang dan sejarah kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina. Berikutnya, akan dijelaskan juga bagaimana pengambilan keputusan dalam forum DK-PBB. Penelitian ini juga akan membahas titik lemah dari berbagai artikel yang telah membahas sikap Indonesia namun belum menitikberatkan kepada bagaimana strategi Indonesia menempatkan dirinya sebagai anggota tidak tetap DK-PB dari sudut pandang isu Yerusalem. Oleh karena itu, peneliti akan membahas secara mendalam penelitian ini dengan judul “Sikap Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Isu Yerusalem (2017-2019)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sikap Indonesia Sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB Terhadap Isu Yerusalem (2017-2019)?”

C. Tujuan Penulisan

Sebagaimana uraian penjelasan latar belakang diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sikap Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terhadap isu Yerusalem (2017-2019).
2. Untuk mengetahui strategi kebijakan luar negeri Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB dalam menyikapi isu Yerusalem (2017-2019).

D. Kerangka Berpikir

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian untuk mencapai tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan salah satu teori yang sering ditemui dalam kajian hubungan internasional. Kepentingan nasional sendiri mempunyai banyak arti yang didefinisikan oleh masing-masing ilmuwan dan peneliti. Dalam penelitian ini akan digunakan konsep kepentingan nasional untuk menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana sikap Indonesia terhadap isu Yerusalem.

Kepentingan nasional adalah setiap motivasi, tujuan utama dan sebab dari sebuah negara membuat kebijakan luar negeri untuk mencapai kepentingan nasionalnya terlepas dari bagaimana identitas sebuah negara tersebut. (Ozpek, 2014). Pengertian ini mempunyai makna bahwa kepentingan nasional merupakan sekumpulan pendapat yang datang dari berbagai sudut pandang yang kemudian menjadi satu untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dalam konteks ini, kepentingan nasional juga berarti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh negara guna memenuhi kebutuhan domestik negaranya.

Kepentingan nasional juga dikaji dalam beberapa sudut pandang. Salah satunya adalah kepentingan nasional dalam sudut pandang konstruktivisme. Kelompok konstruktivis yang mulai muncul pada tahun 80-an berpendapat bahwa kepentingan nasional tidak selamanya bersifat *state-centric* dan bertujuan untuk mendapatkan materi. Alexander Wendt sebagai penggagas utama teori ini mengemukakan bahwa negara adalah aktor utama dalam dunia hubungan internasional. Namun peran negara bersifat lebih fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan dunia dan perubahan struktur sosial (Rachmawati, 2017). Sehingga, Alexander

Wendt meyakini bahwa kepentingan nasional dapat muncul karena adanya gagasan yang dibentuk bersama sebab adanya perubahan struktur sosial dalam masyarakat hubungan internasional.

Dilihat dari sudut pandang konstruktivisme bahwa kepentingan nasional Indonesia terhadap isu Yerusalem (2017-2019) dipengaruhi karena adanya perubahan keadaan politik dunia internasional. Hal ini dipicu oleh adanya pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan memindahkan kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Hal ini memicu reaksi negara-negara di dunia yang merespon berupa penolakan pemindahan kantor kedutaan besar karena hal tersebut sama dengan mengakui Yerusalem sebagai negara yang berada dalam wilayah kedaulatan Israel. Hal ini dapat menimbulkan perang berkepanjangan dan dapat menyebabkan ketidakstabilan keamanan di wilayah tersebut.

Konsep kepentingan nasional juga dapat dijelaskan dalam sudut pandang *English School*. Teori ini dikemukakan oleh Martin Weight dan Hedley Bull yang berpendapat bahwa kepentingan nasional dibentuk karena adanya kesadaran kepentingan bersama dalam menjaga kestabilan tatanan masyarakat internasional. *English School* berpendapat bahwa kepentingan nasional dapat dipengaruhi karena adanya kepedulian negara lain untuk menjaga kedaulatan dan entitas negara lainnya. Hal ini didasari dengan pemikiran tentang pengaruh yang akan muncul dengan menjaga entitas dan eksistensi negara lainnya (Umar, 2014).

Dari sudut pandang *English School* bahwa konsep kepentingan nasional dapat diaplikasikan ke dalam kasus sikap Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB terhadap Isu Yerusalem (2017-2019). Indonesia ingin menjaga entitas dan eksistensi kedaulatan Palestina. Indonesia melihat dampak positif sebagai *output*

dalam kebijakan tersebut. Indonesia sendiri mempunyai kepentingan ingin menjadikan Indonesia sebagai negara yang menjadi motor penggerak dalam keamanan internasional. Indonesia juga ingin memposisikan dirinya sebagai negara yang humanis dengan cara berpartisipasi aktif dalam semua isu kemanusiaan dan salah satunya adalah isu Yerusalem. Sikap Indonesia ini mempunyai tujuan agar Indonesia dipandang sebagai negara yang mempunyai citra baik sehingga menciptakan kemudahan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan berbagai negara di dunia.

2. Politik Luar Negeri

Politik luar negeri adalah aksi eksplisit dan implisit yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk mencapai kepentingan nasional yang berada di lingkungan eksternal negara tersebut. Politik luar negeri juga bisa diartikan sebagai identitas sebuah negara dalam melakukan hubungan dengan negara lainnya. Selain itu politik luar negeri juga dapat didefinisikan sebagai aksi, tindakan dan atau kebijakan suatu negara terhadap lingkungan eksternalnya dalam rangka memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan nasionalnya (Aleksius, 2008).

Politik luar negeri sebuah negara cenderung bersifat statis karena bersifat prinsipal. Berbeda dengan kebijakan luar negeri yang cenderung dinamis dan berubah-ubah mengikuti situasi domestik maupun lingkungan luar negeri. Dalam hal ini, Indonesia mempunyai politik luar negeri yang bersifat bebas aktif. Bebas berarti sikap yang tidak memihak kepada satu pihak dalam menyikapi masalah internasional. Aktif berarti berperan secara konsisten dalam menciptakan perdamaian dunia dan meredakan ketegangan antara kedua pihak (Hatta, 1976).

Berdasarkan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif, Indonesia membuat kebijakan tentang

sikap Indonesia terhadap isu Yerusalem berprinsip pada politik luar negeri bebas aktif. Indonesia tidak berpihak kepada satu atau dua negara yang terlibat dalam isu terkait melainkan menempatkan posisi sebagai mediator dan mencari solusi alternatif di dalam penyelesaian konflik tersebut. Selain itu prinsip politik bebas aktif juga mendorong Indonesia untuk terus mengedepankan asas kemanusiaan dan terus menjadi aktor penggerak perdamaian dunia. Dengan kata lain, kebijakan Indonesia untuk mendukung Palestina merupakan implementasi dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Politik luar negeri juga sering disebut sebagai bentuk implementasi dari perjuangan mewujudkan kepentingan nasional. Sehingga politik luar negeri sangat erat hubungannya dengan politik domestik. Bentuk dari politik luar negeri mempertimbangkan pengaruh politik dalam negeri sehingga pemerintah dalam merespon isu internasional harus melihat serta mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan diterima oleh negara sebelum menetapkan sebuah kebijakan (Wuryandari, 2008).

Adapun bentuk politik luar negeri yang kemudian di implementasikan ke dalam kebijakan luar negeri berupa pernyataan sikap Indonesia didorong oleh aspirasi masyarakat. Identitas Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim menekankan kepada pemerintah untuk segera menyatakan sikap terkait isu Yerusalem. Kelompok swadaya masyarakat dan beberapa pegiat pejuang kemerdekaan Palestina juga menghimbau kepada pemerintah RI untuk segera memberikan respon terhadap isu Yerusalem. Dengan demikian, aspirasi dari masyarakat tersebut menjadi bentuk kekuatan kepentingan nasional yang kemudian diolah menjadi kebijakan luar negeri.

Kemudian, bentuk politik luar negeri juga tidak terlepas dari prinsip dasar negara dengan kata lain UUD 1945 dan Pancasila. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 terdapat

kalimat seruan yang menyebutkan untuk ikut andil dalam menjada perdamaian dunia dan keadilan sosial. Para pendahulu bangsa memberikan amanah kepada generasi penerus bangsa untuk terus aktif menjaga keamanan global. Dengan kata lain, hal ini menjadi prinsip dasar bagi pemerintah RI yang wajib dilaksanakan dalam menjaga perdamaian dunia. Pemerintah Republik Indonesia dengan tegas menyatakan siap membela Palestina karena menganggap bahwa isu Yerusalem dapat menjadi ancaman bagi keamanan global. Dengan demikian, Indonesia terus mengawasi terkait proses perdamaian Palestina dan mendukung Palestina.

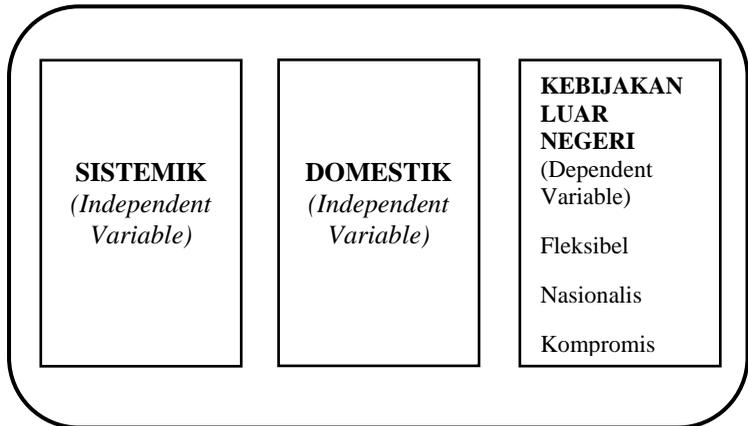
Kebijakan luar negeri adalah sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pemerintah sebagai lembaga eksekutif tertinggi berdasarkan pertimbangan dewan sebagai lembaga legislatif, partai politik dan keadaan politik domestik dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan negeri. (Muller, 2015).

Dalam pengertian diatas menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri berarti sikap ataupun respon sebuah negara karena sebab melihat suatu kejadian internasional. Setiap isu internasional mempunyai dampak baik itu kecil maupun besar di setiap negara yang ada di dunia. Namun yang perlu digarisbawahi sebelumnya bahwa kebijakan luar negeri tidak diambil hanya berdasarkan keputusan prerogatif Presiden. Namun juga melihat pertimbangan dari sisi badan legislatif, kebutuhan domestik, kepentingan nasional dan isu-isu domestik yang terdapat dalam sebuah negara.

Kebijakan luar negeri juga dibuat berdasarkan dari kedua faktor yaitu faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal merupakan setiap pengaruh atau keadaan yang dapat mempengaruhi kebijakan dalam negeri yang berasal dari keadaan dunia internasional. Artinya, keadaan politik global dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri pada suatu negara. Selain itu, kebijakan dalam negeri juga dapat

dipengaruhi dari faktor internal. Antara lain yaitu partai politik, opini publik, media, elit politik, lembaga legislatif, budaya politik dan kelompok kepentingan (Maksum, 2015).

Agar lebih mudah dalam memahaminya, terdapat kerangka berpikir yang lebih sistematis bagaimana proses kebijakan luar negeri dibentuk menurut Jeffrey W. Taliaferro adalah sebagai berikut:



Gambar1.1: Kerangka Analisis Perumusan Kebijakan Luar Negeri

Dari tabel diatas faktor eksternal/sistemik dan Domestik berperan sebagai variabel independen yang berarti mempunyai fungsi mempengaruhi. Sementara kebijakan luar negeri berperan sebagai variabel dependen yang berarti dipengaruhi. Terdapat empat komponen atau sifat dalam sebuah kebijakan luar negeri. Pertama, fleksibel yang artinya kebijakan yang ditimbang berdasarkan kondisi dunia internasional. Kedua, nasionalis yang berarti kebijakan yang bersifat menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalis dan sesuai dengan cita-cita negara. Ketiga, kompromis yang berarti kebijakan yang bersifat terbuka dan kecenderungan untuk bekerjasama demi mencapai kepentingan bersama.

Melalui kerangka berpikir diatas, dapat dilihat bahwa Sikap Indonesia dalam menyikapi isu keamanan yang

terjadi di Yerusalem dipengaruhi oleh variabel domestik. Pemerintah Indonesia telah berulang kali mengeluarkan pernyataan tentang dukungan untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Hal ini didorong oleh opini publik yang merupakan bagian dari variabel domestik tersebut. Penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dan opini publik yang dinyatakan oleh tokoh masyarakat menjadi bahan pertimbangan pemerintah Indonesia dalam menyikapi isu keamanan di Yerusalem. Selain itu, opini publik juga dibangun berdasarkan amanat UUD 1945 yang tercantum pada halaman pembukaan yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Opini ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla. Beliau mengatakan bahwa mendukung kemerdekaan Palestina telah menjadi kewajiban Bangsa Indonesia sesuai yang tercantum dalam amanat dasar negara kita Pancasila.

Selanjutnya, dilihat dari sudut pandang variabel sistemik/eksternal bahwa setelah perang dingin berakhir isu keamanan manusia menjadi isu utama yang dibahas dan dikaji. *United Nation Development Program (UNDP)* menyatakan bahwa peran negara bangsa sangat penting dalam merumuskan konsep keamanan wilayah. Kedaulatan negara dan keamanan wilayah menjadi fokus utama dalam agenda keamanan dunia. Oleh sebab itu, isu keamanan manusia menjadi tanggung jawab bagi seluruh negara bangsa di dunia tidak terlepas dari Indonesia sebagai salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, keadaan politik tentang isu keamanan manusia dan wilayah dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri Indonesia (Padmi, 2015). Dengan demikian, kebijakan luar negeri dibuat berdasarkan faktor eksternal mengikuti keadaan dunia internasional dan juga internal berdasarkan kekuatan politik domestik salah satunya dari opini publik.

E. Hipotesis

Hipotesis yang dapat diambil tentang bagaimana sikap Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB terhadap isu Yerusalem adalah:

1. Sikap Indonesia yaitu menolak pemindahan kantor kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem.
2. Sikap Indonesia yaitu mendukung kemerdekaan Palestina dengan mengkampanyekan dan menggaling suara internasional untuk mendukung kemerdekaan Palestina.

F. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan waktu pada tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 Amerika Serikat mengumumkan rencananya memindahkan kantor kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem. Pertengahan tahun 2018 Amerika Serikat merealisasikan rencananya dengan memindahkan kantor kedutaan besarnya secara resmi ke Yerusalem. Selanjutnya pada awal tahun 2019, Indonesia resmi menjalankan tugasnya sebagai anggota tidak tetap DK-PBB terhitung mulai 1 Januari 2019 lalu. Dengan demikian, Indonesia membuat kebijakannya mengenai sikap dan respon tentang isu Yerusalem.

G. Metodologi Penelitian

Pada penelitian ini akan menggunakan beberapa metode atau cara dalam pengambilan data yang bertujuan untuk mendukung referensi dari penelitian yang telah dibuat. Metodologi sendiri juga bertujuan untuk memudahkan dalam pembuatan penelitian ini.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskripsi analitis. Penelitian ini dimulai dengan memberikan gambaran secara umum tentang latar belakang dan sejarah kejadian yang ingin diteliti. Kemudian, dari gambaran kejadian akan dilakukan analisa secara periodik dengan data primer dan sekunder. Adapun tujuannya yaitu untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian secara periodik dan sistematis dengan data-data yang akurat, tepat dan faktual. Selanjutnya, penelitian ini akan berfokus kepada bagaimana sikap dan respon Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB terhadap isu Yerusalem pada tahun (2017-2019).

2. Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang telah ada sebelum penelitian ini dilakukan. (Khrisna, 2017) Dengan kata lain, data sekunder didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh orang lain. Adapun data sekunder yang digunakan berupa literatur seperti tesis, skripsi, jurnal artikel, buku, peraturan perundang-undangan, website dan berbagai sumber online lainnya yang berhubungan dengan kebijakan dan sikap Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK-PBB terhadap isu Yerusalem (2017-2019).

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kepustakaan dimana penelitian ini memanfaatkan referensi dan sumber berupa artikel, buku, jurnal, tesis, skripsi dan berbagai referensi offline maupun online lainnya yang berhubungan dengan analisa tentang kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina dari era perang dingin hingga tahun (2017-2019). Pendekatan kepustakaan ini juga menggunakan analisa tentang bagaimana mekanisme kebijakan luar negeri dibuat untuk

menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana Indonesia membuat Kebijakan luar negerinya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berdasarkan studi literatur sebab penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan. Beberapa studi literatur yang akan digunakan yaitu berasal dari website resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia, website dan beberapa berita yang berhubungan dengan sejarah dan konflik penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pola analogi logika deduktif. Pola pikir analogi deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari fakta-fakta umum ke fakta-fakta khusus. (Ruslan, 2015) Fakta atau premis umum yang dimaksud adalah teori-teori kebijakan serta setiap prinsip peraturan yang ada, adapun premis khususnya yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan.

H. Sistematika Kepenulisan

Sistematika dalam kepenulisan ini terdiri dari lima bab yang dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi penulisan penelitian. Kelima bab tersebut yaitu pendahuluan, objek penelitian, pembahasan, tinjauan pustaka dan penutup dengan rincian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka berpikir, hipotesa hingga sistematika kepenulisan.

BAB II SEJARAH POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA TERHADAP PALESTINA

PADA ERA PERANG DINGIN HINGGA PASCA ERA PERANG DINGIN (1947-2017)

Bab kedua ini akan menjelaskan secara periodisasi tentang bagaimana kebijakan Indonesia terhadap Palestina di era Perang Dingin hingga setelah era perang dingin. Bab kedua ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara umum bagaimana sejarah awal mula hubungan luar negeri antara Indonesia dengan Palestina.

BAB III DINAMIKA KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM DEWAN KEAMANAN PBB

Bab ketiga akan dijelaskan bagaimana dinamika dan proses keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB secara singkat dan periodik. Penulisan pada Bab ketiga ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang hubungan keanggotaan Indonesia di DK PBB dengan hubungannya dengan Palestina.

BAB IV UPAYA DAN SIKAP INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA TIDAK TETAP DEWAN KEAMANAN PBB TERHADAP ISU YERUSALEM (2017-2019)

Bab keempat akan menjelaskan tentang pokok inti studi kasus bagaimana Indonesia akan berperan dan bersikap sebagai anggota tidak tetap DK-PBB terhadap isu Yerusalem.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dan jawaban akhir rumusan masalah dari penelitian ini. Kemudian, bab ini juga berisi tentang rekomendasi dan saran tentang kekurangan dari penelitian yang telah dibuat.